

# Analisis Komunikasi Publik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada PLTU Kabupaten Batang)

Choerul Bariyah<sup>1</sup>, Mukoyimah<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Program Studi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah <sup>2</sup> UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan,

Email: choerulbariyah19@gmail.com<sup>1</sup>, mukoyimah@uingusdur.ac.id <sup>2</sup>

## Article Info

### Article history:

Received: 04 May 2023

Accepted: 30 May 2023

Published : 31 May 2023

### Keyword:

*Public Communication, Community Welfare, PLTU.*

### Kata Kunci:

*Komunikasi Publik, Komunikasi Kesejahteraan, PLTU*

## Abstract

*Public communication is one of the efforts to provide information to the public in order to minimize public miscommunication. This study aims to find out how public communication is carried out by the government and investors, in this case, BPI (Bhimasena Power Indonesia) regarding the scope of the PLTU in the Batang region. The scope of PLTU development concerns how the raw materials are used and the safety and welfare of the surrounding community. Research using field research method with a descriptive approach. The main source of information is the results of interviews. While the data analysis technique that the author uses is data reduction then presenting the data and the last is concluding. The results of the author's research show that investors' efforts to socialize the establishment of PLTU are not easy. There are many objections from the community, both fighting for environmental health and land acquisition by the PLTU. The government and investors are trying to educate the public. Coal fuel is not without impact, but this impact can be minimized by having a good living culture and good management of coal waste by BPI. The efforts of the government and BPI in educating the public are carried out using an individual approach (presence at community forums) and also through the media, by providing information, complaints, and education services (in the form of comics). This aims to make it easier for the public to understand the intent and purpose of the establishment of the PLTU.*

Komunikasi public menjadi salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada khalayak agar meminimalisir miskomunikasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana komunikasi public yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak investor dalam hal ini adalah BPI (Bhimasena Power Indonesia) tentang ruang lingkup PLTU di wilayah Batang. Rung lingkup pembangunan PLTU tidak hanya perihal bagaimana bahan baku yang digunakan, tetapi juga keamanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Penelitian menggunakan metode *field research* dengan pendekatan deskriptif. Sumber utama informasi ialah dari hasil wawancara. Sedangkan teknik

### Corresponding Author:

Jurnal Mu'ashir : Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Institut Pesantren Mathali'ul Falah

Jl. Raya Pati-Tayu km. 20 Purworejo Margoyoso Pati

---

analisis data yang penulis gunakan ialah reduksi data lalu menyajikan data dan terakhir ialah penarikan kesimpulan. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa upaya investor dalam mensosialisasikan pendirian PLTU tidak berjalan mudah. Banyaknya pertentangan dari pihak masyarakat baik yang memperjuangkan kesehatan lingkungan maupun pembebasan lahan oleh PLTU. Pemerintah dan investor berupaya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Bahan bakar batu bara bukan tidak memiliki dampak, namun dampak ini dapat diminimalisir dengan adanya budaya hidup yang baik serta telah adanya pengelolaan limbah batu bara dengan baik oleh BPI. Upaya pemerintah dan BPI dalam mengedukasi masyarakat dilakukan dengan pendekatan perseorangan (hadir pada forum-forum masyarakat) dan juga melalui media, dengan membuat layanan informasi, pengaduan, dan edukasi (dalam bentuk komik). Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memahami maksud dan tujuan berdirinya PLTU.

*Copyright © 2023 Muashir: Jurnal Dakwah & Komunikasi. All rights reserved.*

---

## Pendahuluan

Kabupaten Batang terletak di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 78.864,16 Luas total tersebut, 22.41,08 Ha (28,42%) adalah wilayah daratan untuk sawah dan 56.453,16 Ha (71,58%) tanah kering. Kabupaten Batang memiliki topografi pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Ada 5 pegunungan dengan ketinggian rata-rata di atas 2.000 m. Secara geografis Kabupaten Batang terletak antara 6° 51' 46" dan 7° 11' 47" Lintang Selatan dan 109° 03' 06" Bujur Timur. Sebelah utara adalah Laut Jawa.

Kabupaten Batang yang memiliki potensi pesisir garis pantai sepanjang 38,75 km dengan perairan laut seluas 287,06 km<sup>2</sup> dan perairan daratan seluas

228, 16 km<sup>2</sup> menempatkan potensi perikanan sebagai potensi unggulan darat kedua setelah pertanian. Kondisi geografis demikian, jelas memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar termasuk didalamnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri produk perikanan, konservasi dan tentunya pariwisata bahari serta pantai.<sup>1</sup> Mayoritas masyarakat Batang yang tinggal berdekatan dengan wilayah perairan berprofesi sebagai nelayan.

Pantai Utara Jawa Tengah khususnya pesisir Kabupaten Batang memang terkenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Tak heran jika kebanyakan masyarakatnya menggantungkan hidup dari hasil melaut. Guna mengantisipasi

---

<sup>1</sup> Benny Abidin, "Penolakan Warga Terhadap Proyek PLTU Batang: Telaah Sosiologi Hukum," *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018) h. 134.

eksploitasi berlebihan dari pihak tidak bertanggung jawab maka pemerintah kabupaten memutuskan untuk menjadikan laut Batang sebagai wilayah konservasi sejak tahun 2005. Yakni kawasan pantai Ujungnegoro Roban sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Penetapan kawasan konservasi tersebut berdasarkan pada kriteria ekologi, sosial budaya, dan ekonomi sehingga diharapkan pemilihan lokasi konservasi sesuai dengan tujuan konservasinya dengan memperhatikan kondisi ekologis dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.<sup>2</sup> Hal tersebut secara resmi tertuang dalam Peraturan Bupati Batang nomor 07 tahun 2010 tentang pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/ Taman Pesisir Ujungnegoro Kabupaten Batang.

Peraturan tersebut diharapkan pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat dapat turut menjaga kelestarian dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Namun baru-baru ini, terhitung sepuluh tahun terakhir pemerintah pusat tengah mengencakan proyek raksasa di wilayah yang masuk dalam kriteria konservasi tepatnya Ujungnegoro hingga Roban. Terlaksananya pembangunan tersebut telah mendapat izin langsung dari Bupati Batang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Batang nomor 88 tahun 2010 tentang, "Forum Komunikasi Antara Masyarakat Desa,

PT Bhimashena Power Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang".

Berdirinya proyek tersebut didasari dari semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia sejalan dengan naiknya kebutuhan akan listrik. Mengilas balik tahun 2017 silam, negara Indonesia sempat mengalami krisis sumber daya listrik. Krisis tersebut mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari hal itu, pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak berusaha untuk memenuhi kebutuhan publik dengan membangun pembangkit listrik, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU dipilih sebagai alternatif penghasil listrik yang murah dan ekonomis dikarenakan bahan bakunya yang melimpah dan mudah didapat daripada hasil bumi lainnya. Kabupaten Batang terpilih sebagai tempat didirikannya PLTU melalui seleksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah. Sebelumnya telah dilakukan survei di tiga kabupaten, yakni Kendal, Batang, dan Pemalang sebagai calon lokasi pembangunan PLTU. Batang menjadi lokasi yang paling cocok untuk dilakukan pembangunan PLTU karena di Batang terdapat lahan milik PTPN (PT Perkebunan Nasional) sehingga proses

<sup>2</sup> Konservasi Laut et al., "Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Maquares" 3 (2014): 28–33.

pembebasan lahan akan lebih mudah. Selain itu, dipilihnya Batang dikarenakan garis pantainya stabil serta kedalaman lautnya mencukupi untuk pembangunan pelabuhan sebagai sarana pemasok bahan baku batubara. Sesuai kriteria diatas Desa Karanggeneng merupakan lokasi yang paling sesuai dengan perencanaan pembangunan PLTU.<sup>3</sup>

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah atau lebih dikenal dengan PLTU Batang merupakan salah satu mega proyek yang sedang dikerjakan pemerintah. Dalam rubrik resmi yang dirilis PLN, proyek ini merupakan proyek showcase KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) dengan skala besar pertama bernilai investasi lebih dari Rp 30 trilliun, sekaligus proyek KPS pertama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Selain itu, PLTU ini juga diklaim sebagai PLTU yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2006, pemerintah telah menetapkan proyek PLTU Batang sebagai salah satu model proyek KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta). Disamping itu, proyek ini juga merupakan salah satu proyek yang turut dimasukkan di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dan sekaligus merupakan model showcase

KPS yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2010.<sup>4</sup> Tujuan utama di bangunnya PLTU ini seperti halnya yang telah dijelaskan diatas yakni sebagai pemasok listrik khususnya bagi wilayah Jawa dan Bali. Selain itu proyek ini diharapkan dapat mencipta peluang kerja besar-besaran serta pertumbuhan ekonomi negara dapat terjaga. Terciptanya ekonomi masyarakat yang stabil mendorong semakin tingginya tingkat kesejahteraan suatu negara.

Normalnya proyek negara pasti tidak jauh dengan pembebasan lahan atau pengadaan tanah demi kelancaran pembangunan. PLTU Batang di bangun di tanah seluas 700 hektare dan dilakukan oleh PT Bhimasena Power Indonesia. Meski terdapat lahan milik PTPN, namun negara tetap harus mengupayakan lahan milik masyarakat guna memenuhi luas tanah yang dibutuhkan. Negara melalui pemerintah melakukan pembangunan untuk kepentingan umum. Pemerintah memiliki wewenang untuk memperoleh tanah dari pemiliknya. Ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah ditetapkan melalui musyawarah penetapan ganti kerugian yang melibatkan pihak yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.

Proses terjadi ketidakserasian antara pemerintah dan masyarakat setempat. Masyarakat memiliki alasan kuat bahwa tanah yang akan dibangun

<sup>3</sup> Dewi Prabandari and Aloysius Rengga, "Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan PLTU Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten

Batang," *Journal of Public Policy and Management Review* 53, No. 9 (2018) h. 168–169.

<sup>4</sup> Abidin, "Penolakan Warga Terhadap Proyek Pltu Batang: Telaah Sosiologi Hukum." *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018), h. 134.

PLTU merupakan tanah produktif dan Kawasan konservasi laut daerah seperti dijelaskan diatas, yang tentunya menjadi sumber pangan utama masyarakat dan pemasok ke daerah luar. Selain alasan tersebut tidak adanya kecocokan harga antara pemilik tanah dan pembeli menjadi faktor besar adanya problem pengadaan tanah dalam proyek PLTU Batang ini. Selain menuai kritik dari masyarakat, proyek raksasa ini juga menuai kecaman dari berbagai pihak pemerhati lingkungan diantaranya; Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang lingkungan.

Aksi protes tersebut seperti tak pernah ada habisnya, baru-baru ini masyarakat nelayan roban memperingati aksi sepuluh tahun melawan adanya PLTU. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana proses komunikasi public yang terjadi antara investor/pelaksana pembangunan PLTU Batang kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan. Peneliti mengambil judul "Analisis Komunikasi Publik PLTU Batang Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat".

## METODOLOGI

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif lapangan.<sup>5</sup> Pendekatan ini dimungkinkan agar pembaca memahami secara komperhensif realitas sosial di sekitar objek penelitian penulis. Sumber utama peneliti ialah pihak internal PLTU, pemerintah, aktivis/pengamat lingkungan dan masyarakat yang secara langsung terdampak dari adanya pembangunan tersebut. Adapaun beberapa sumber utamanya ialah sebagai pada table berikut:

Narasumber	Rincian	Jumlah
Pemerintah Desa	Pegawai Balai Desa	1
Pekerja PLTU	Bagian olah limbah	1
Masyarakat	Nelayan, Ibu rumah tangga, dan Petani	3
Mantan Pegawai PLTU	Maintenance	1
Pemerhati Lingkungan	Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	1

Tabel 1. Data Narasumber

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi terlebih

<sup>5</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, NilaCakra Publishing House, Bandung, 2018,

yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.

dahulu, hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan informan. Peneliti melakukan pengamatan langsung di wilayah pembangunan daerah Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng dan wilayah Roban. Kemudian peneliti melakukan wawancara sesuai waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. wawancara dilakukan dengan terstruktur melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dan kemudian jika peneliti menerima informasi yang bias, maka peneliti akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur wawancara, baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara peneliti lakukan kepada pemerintah desa, Pegawai PLTU, Mantan Pegawai PLTU, Nelayan, Pemerhati Lingkungan, dan Masyarakat umum. Sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah reduksi data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.<sup>6</sup>

## HASIL dan PEMBAHASAN

### A. PEMBAHASAN

#### 1. Komunikasi Publik

Menurut Alo Liliweri komunikasi publik merupakan interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada

sejumlah orang (khalayak) yang berbeda latar belakang kebudayaan dalam sitausi pertemuan.<sup>7</sup> Rusdiana menjelaskan komunikasi publik sebagai proses keomunikasi di mana pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada khalayak yang lebih besar baik dengan tatap muka maupun melalui media, seperti radio, televisi, media daring, dan atau di luar ruang. Sedangkan menurut Hageman komunikasi publik merupakan komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak maupun lembaga atau orang yang melembagakan yang ditujukan kepada sejumlah besar orang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik merupakan interaksi yang bersifat massa baik menggunakan media (cetak dan elektronik) maupun secara langsung tanpa media.

#### Tujuan Komunikasi Publik

Beberapa tujuan komunikasi publik dipaparkan dalam buku Onong Uchjana Effendy yang berjudul "Dimensi-dimensi Komunikasi", sebagai berikut:

a. Memberikan informasi (*Public Information*) kepada masyarakat. Karena perilaku menerima informasi merupakan perilaku alamiah masyarakat. Dengan menerima informasi yang benar masyarakat akan merasa aman tentram. Informasi akurat

<sup>6</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak, 2018). H. 56.

<sup>7</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal* (Jakarta: Kencana, 2017)

[https://www.google.co.id/books/edition/Komunikasi\\_AntarPersonal/Vzq2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=alo+liliweri&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Komunikasi_AntarPersonal/Vzq2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=alo+liliweri&printsec=frontcover).

diperlukan oleh beberapa bagian masyarakat untuk bahan dalam pembuatan keputusan. Informasi dapat dikaji secara mendalam sehingga melahirkan teori baru dengan demikian akan menambah perkembangan ilmu pengetahuan. Informasi disampaikan pada masyarakat melalui berbagai tatanan komunikasi, tetapi yang lebih banyak melalui kegiatan "mass communication.

b. Mendidik masyarakat (*Public Education*). Kegiatan komunikasi pada masyarakat dengan memberikan berbagai informasi tidak lain agar masyarakat menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang kebudayaannya. Kegiatan mendidik masyarakat dalam arti luas adalah memberikan berbagai informasi yang dapat menambah kemajuan masyarakat dengan tatanan komunikasi massa. Sedangkan kegiatan mendidik masyarakat dalam arti sempit adalah memberikan berbagai informasi dan juga berbagai ilmu pengetahuan melalui berbagai tatanan komunikasi kelompok pada pertemuan-pertemuan, kelas-kelas, dan sebagainya. Tetapi kegiatan mendidik masyarakat yang paling efektif adalah melalui kegiatan Komunikasi Interpersonal antara penyuluh dengan anggota masyarakat, antara guru dengan murid, antara pimpinan dengan bawahan, dan antara orang tua dengan anak-anaknya.

c. Mempengaruhi masyarakat (*Public Persuasion*). Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat juga dapat dijadikan sarana untuk mempengaruhi masyarakat tersebut ke arah perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan. Misalnya mempengaruhi masyarakat untuk mendukung suatu pilihan dalam pemilu dapat dilakukan melalui komunikasi massa dalam bentuk kampanye, propaganda, selebaran-selebaran, spanduk dan sebagainya. Tetapi berdasarkan beberapa penelitian kegiatan mempengaruhi masyarakat akan lebih efektif dilakukan melalui Komunikasi Interpersonal.

d. Menghibur masyarakat (*Public Entertainment*). Perilaku masyarakat menerima informasi selain untuk memenuhi rasa aman juga menjadi sarana hiburan masyarakat. Apalagi pada masa sekarang ini banyak penyajian informasi melalui sarana seni hiburan.<sup>8</sup>

### Efek Komunikasi Publik

Menurut Mc.Luhan ada beberapa dampak yang ditimbulkan karena penerapan komunikasi publik yaitu:

1. Efek Kognitif ialah akibat yang ditimbulkan pada diri komunikan yang sifatnya informatif. Selain itu tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dapat mempelajari

<sup>8</sup> Mona Evira Dienty and Martha Tri Lestari, "Analisis Proses Komunikasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) PT.

Kereta Api Indonesia Persero Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik" 9, no. 2 (2022): 945–956.

informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif

2. Efek *afektif* yaitu tujuan komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahukan kepada khalayak agar mengetahui informasi yang disampaikan tetapi lebih dari itu bahwa setelah mengetahui informasi khalayak dapat menerapkan dan merasakan manfaat dari informasi tersebut.

3. Efek *behavioural* yaitu akibat yang ditimbulkan pada diri khalayak dalam bentuk perilaku kegiatan atau tindakan.<sup>9</sup>

### Upaya Komunikasi Investor Kepada Masyarakat

Pihak PLTU dalam hal ini PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Sebagai perusahaan konsorium yang memenangkan lelang proyek PLTU, PT BPI melakukan sosialisasi melalui juru bicara/perwakilan PT kepada masyarakat. Selain sosialisasi secara *face to face*, BPI juga melakukan sosialisasi melalui website resmi *bhimasenapower.co.id*. Melalui saluran website, BPI mensosialisasikan pada masyarakat mengenai apa itu PLTU dikemas dalam bentuk desain komik yang menarik dan berbagai artikel yang mudah diakses.



Total halaman kurang lebih 26 slide yang dapat diakses melalui website resmi [bhimasenapower.ac.id](http://bhimasenapower.ac.id)

#### Tabel 1.

Artikel yang diunggah pada laman tersebut pihak BPI mengungkapkan bahwa bahan baku yang mereka gunakan merupakan bahan ramah lingkungan. Dengan mengadopsi teknologi USC (*Ultra-Super Critical*), untuk CFPP Jawa Tengah, dengan efisiensi termal yang lebih tinggi. Selain itu BPI juga mengadopsi dengan pemberlakuan sistem gas buang dan sistem pengolahan air limbah. Tak hanya teknologi tetapi dibarengi dengan manajemen yang baik guna mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Selain upaya sosialisasi, BPI juga menggalakkan proses mitigasi sosial. Setelah izin AMDAL (Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) secara resmi diperoleh dari Gubernur Jawa Tengah pada 2013 lalu. BPI bersama pemerintah daerah merumuskan 3 alternatif formula pendapatan bagi petani yang terkena dampak, baik yang berupa dampak perubahan pola mata pencaharian maupun dampak dari pembebasan

<sup>9</sup> "Beacon Series in Contemporary Communications) Marshall McLuhan (Editor)\_ Edmund Carpenter

(Editor) - Explorations in Communication, an Anthology.-Beacon Press (1960).Pdf,"



lahan. Ketiga program mitigasi tersebut antara lain: Memberikan santunan social, pengadaan tanah pengganti, menciptakan wirausaha baru, dengan memberikan bantuan teknis

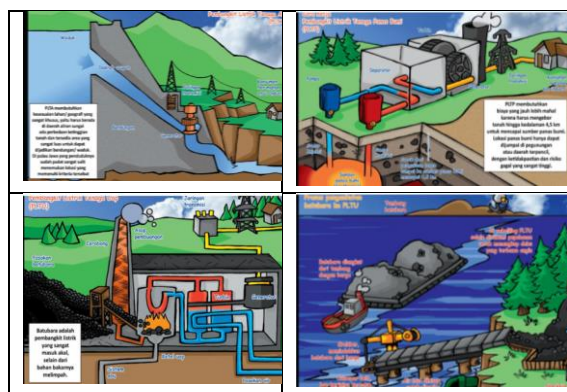
Sebagian masyarakat sekitar juga turut merasakan dampak dari adanya proyek tersebut, warga dipekerjakan dengan sistem kontrak. Lapangan pekerjaan pun dibuka secara besar-besaran dengan kuota khusus bagi masyarakat sekitar (wawancara masyarakat terdampak, 13 November 2022).

BPI selalu berusaha membuka dalam hal akses informasi melalui sosialisasi, konsultasi, papan informasi, mekanisme pengaduan, korespondensi, dan pembentukan forum komunikasi bagi masyarakat yang memiliki keluhan dengan adanya pembangunan tersebut.

Komunikasi intens dilakukan oleh pihak BPI bukan hanya sekedar untuk mensosialisasikan program tetapi juga untuk membangun hubungan/relasi antara masyarakat dengan perusahaan. Tujuannya adalah agar PLTU mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. PLTU menjadi salah satu energy listrik yang tidak hanya dibutuhkan oleh segelintir masyarakat, tetapi juga mencakup banyak orang. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan listrik masyarakat selalu meningkat setiap tahu, sehingga dibutuhkan penambahan pusat pembangkit listrik di Indonesia.

Batang menjadi salah satu lokasi yang terpilih untuk didirakannya PLTU. Terlepas dari pro dan kontra bahwa sudah banyak upaya dilakukan baik dari masyarakat maupun BPI untuk saling duduk bersama mencari titik temu agar kedua belah tidak saling dirugikan dari imbas adanya PLTU di Batang ini tidak berdampak pada kesehatan masyarakat.

Pihak investor melalui media maupun secara langsung (tatap muka) bukan hanya menyapaikan sosialisasi pedirian PLTU tetapi juga mengedukasi kepada masyarakat mengapa menggunakan batu bara hingga dampak yang akan di timbulkan.



Tabel. II. Gambar Edukasi Proses

Selain melalui media pihak BPI juga melakukan edukasi dengan terjun secara langsung ke masyarakat melalui kelompok-kelompok diskusi maupun yang lain. Hal ini bertujuan untuk bisa memberikan pemahaman secara

komprehensif kepada masyarakat bahwa berdirinya PLTU ini bukan hanya persoalan proyek sebagaimana yang digembor-gemborkan tetapi adanya kebutuhan sumber tenaga listrik di masa mendatang.

### **Penolakan Masyarakat dan Pemerhati Lingkungan Terhadap Pembangunan serta Pengoperasian PLTU**

#### **Penolakan Masyarakat Sekitar**

Penggunaan lahan pertanian produktif dan sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar, perkebunan melati seluas 20 hektar dan 152 sawah tadah hujan, menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat. Selain itu proyek tersebut juga didirikan diatas wilayah konservasi laut daerah Ujungnegero Roban. Kawasan konservasi tersebut mayoritas dijadikan tonggak utama bagi nelayan sebagai daerah penghasil tangkapan ikan. Masyarakat takut kehilangan mata pencaharian mereka sebagai petani dan nelayan. Selain itu sawah sawah mereka juga bisa menghasilkan 60 ton per Ha, dibandingkan listrik masyarakat lebih membutuhkan beras sebagai bahan makanan pokok.

Penolakan warga dibuktikan dengan terus mempertahankan tanahnya untuk tidak dijual pada pihak investor. Desa Ujungnegero mendapat jatah kurang lebih 100 hektar untuk dibebaskan, hingga kini (2022) 4 sampai 5 Ha belum menemui titik terang atau belum dilakukan proses pembebasan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya

kesepakatan harga antara investor dan pemilik lahan (wawancara pemerintah desa, 23 November 2022).

Beberapa warga Batang juga sudah melakukan perbandingan dengan wilayah di daerah Jawa Tengah lainnya yang mendapat dampak negatif dari adanya pembangunan PLTU, seperti di Cilacap dan Rembang. Salah satu warga Karanggeneg, Batang, Saryudi mengungkapkan telah melakukan studi banding ke dua wilayah tersebut. Tentang bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di sekitar PLTU, ia menemukan beberapa fakta berupa grafik perubahan sebelum dan sesudah adanya PLTU tersebut. Sebelum ada pembangunan PLTU masyarakat di daerah PLTU Cilacap dan PLTU Rembang dapat hidup sejahtera dengan mengolah tanah dan sawah mereka serta dapat mencari ikan di laut yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka. Namun setelah adanya pembangunan PLTU, kehidupan berubah total setelah hilangnya lahan dan sawah mereka. Begitu pula dengan para nelayan, yang mengalami hal serupa dengan penghasilan ikan yang terus menurun karena ikan teracuni oleh limbah PLTU dan banyak yang tersedot oleh mesin dari PLTU. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka sehari-hari inilah yang membuat warga Batang menolak adanya pembangunan PLTU di daerah mereka tersebut.<sup>10</sup>

Seakan menemukan benang merah, 2020 silam nelayan Roban Timur

mendapati sejumlah bongkahan batu bara yang nyangkut di jalan mereka



*Gambar 1 Bongkahan batu bara menyangkut di jaring nelayan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (22/12/2020). Foto: Robby Bernardi/detik.com*

Bongkahan batu bara tersebut merusak jaring nelayan. Di konfirmasi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, Fediawan, ia mengatakan bahwa kemungkinan memang benar bongkahan batu bara tersebut adalah milik PLTU Batang. Menurutnya, bongkahan tersebut merupakan ceceran dari kapal tongkang yang mengangkut batu bara milik PLTU (news.detik.com). Selain bongkahan batu bara, nelayan juga dibuat resah dengan limbah lumpur yang mencemari perairan laut tempat mereka menangkap ikan. Limbah lumpur tersebut juga tidak hanya berada di satu titik melainkan di beberapa tempat kurang lebih satu jam setengah dari bibir pantai, dari yang semula dua jam dari bibir pantai. Kehadiran limbah lumpur tersebut,

cukup mempengaruhi pendapatan dari para nelayan juga merusak jarring yang mereka gunakan.

Dampak-dampak tersebut telah mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar PLTU. Terhitung dua bulan lalu, PLTU Batang telah mulai beroperasi dan menjalankan roda produksinya. Masyarakat beserta aparat desa didampingi beberapa pihak berwenang masih terus menggencarkan aksinya, melakukan demonstrasi penolakan adanya PLTU, dengan beberapa tuntutan seperti kesetaraan harga lahan. Masyarakat Ujungnegoro sendiri masih rutin melakukan demonstrasi dan upaya negosiasi dengan pihak PLTU setiap Rabu atau Kamis di depan pintu masuk PLTU (wawancara dengan pemerintah desa, 23 November 2022).

#### 1. Penolakan dari Aktivis/Pemerhati Lingkungan

Selain gencaran aksi yang dilakukan oleh masyarakat Ujungnegoro dan sekitarnya, para pemerhati lingkungan atau aktivis yang bergerak di bidang lingkungan hidup seperti Greenpeace dan WALHI juga turut melakukan aksi tolak adanya PLTU. Bukan hanya PLTU Batang, pihak-pihak tersebut juga konsisten menyerukan aksinya terhadap pembangunan PLTU di daerah lain seperti; Cirebon, Indramayu, Jepara, Bengkulu dan Cilacap. Hal ini disebabkan karena krisis iklim dan

makin memburuknya kondisi bumi akibat emisi gas karbon yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku batu bara. Selain kehilangan mata pencaharian, masyarakat sekitar juga akan terkena ancaman kesehatan. Polusi dari PLTU akan memberi dampak kesehatan seperti penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernapasan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII Nomor Urut 313, dan peraturan daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029. PLTU Batang memiliki kapasitas 2000 megawatt dan melepaskan sekitar 10,8 juta ton karbon ke atmosfer, yang setara dengan emisi karbon seluruh negara Myanmar pada tahun 2009 (walhi.or.id). PLTU yang menghasilkan panas listrik pada siklus pembakarannya, ternyata menghasilkan polutan lain juga yang ternyata cukup berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Polutan yang dihasilkan berupa SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO dan partikel yang berupa fly ash yang dikeluarkan melalui cerobong asap yang kemudian bisa dihirup oleh angin dan membawa debu ke masyarakat sekitar yang tinggal di dekat PLTU tersebut.<sup>11</sup>

Polusi udara merupakan pembunuh senyap, yang mengakibatkan lebih dari 3 juta jiwa meninggal dunia. Di 2016 polusi udara telah menyebabkan lebih dari 4 juta jiwa

meninggal. Laporan terbaru dari *World Health Organization (WHO)* tahun 2018 mengatakan bahwa 7 juta orang tewas tiap tahun karena polusi udara. Di Indonesia sendiri menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti *Harvard University-Atmospheric Chemistry Modeling Group* menyatakan bahwa kematian dini yang diakibatkan oleh polusi udara dari operasi PLTU Batubara telah menyebabkan sekitar 6.500 jiwa pertahun, dan akan meningkat menjadi 15.700 jiwa/ tahun, jika pembangunan PLTU Batubara terus berlanjut. Lebih lanjut pada tahun 2008 Indonesia menyumbang pembakaran batubara menyumbang sekitar 50% dari emisi SO<sub>2</sub> yang terkait sektor energi, 30% dari emisi PM<sub>10</sub> dan 28% dari emisi NO<sub>x</sub>. PLTU dapat menyebabkan asma, infeksi pernafasan akut dan sebagainya. Resiko penyakit ini meningkat bagi orang yang tinggal disekitaran PLTU. Hasil pembakaran PLTU ini yang berupa partikel-partikel halus itu selain debu yang dapat kita lihat kalau jumlahnya sudah banyak, dapat masuk menembus hingga paru-paru dan juga aliran darah yang dapat menyebabkan kematian dan juga masalah kesehatan lainnya.<sup>12</sup>

Bukan hanya pada masalah kesehatan masyarakatnya yang ditimbulkan, tetapi juga masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran yang dilakukan akibat polutan dari PLTU ini bisa mempengaruhi ekosistem

<sup>11</sup> Theo Alif Wahyu Sabubu, "Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Perspektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 72–90.

<sup>12</sup> Theo Alif Wahyu Sabubu, "Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Perspektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 72–95.

air laut, kekurangan ruang terbuka hijau, cuaca yang semakin memanas, dan juga polusi yang semakin membanyak. Tidak hanya sampai disitu, masyarakat yang mendapatkan dampak dari PLTU ini terutama yang tinggal di sekitar PLTU harus mengeluarkan biaya yang lebih jika sakit karena penyakit yang ditimbulkan bukan merupakan sakit yang biasa seperti demam atau semisalnya, tetapi bisa menyebabkan resiko kanker paru-paru meningkat, stroke, dan juga penyakit jantung. Disisi lain kerentanan terhadap anak kecil, bayi, ibu hamil dan orang tua/lansia juga meningkat karena efek akut dari polusi udara ini.<sup>13</sup> Pembangunan PLTU yang dekat dengan pemukiman akan mengirimkan banyak dampak negatif seperti yang dijelaskan diatas.

Guna meminimalisir dampak tersebut, WALHI bersama *Greenpeace* dan JATAM membersamai masyarakat guna menolak adanya PLTU. WALHI telah berjuang dari ranah terkecil di wilayah Batang, berlanjut ke Provinsi hingga ke Jakarta guna audiensi dengan pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah dan para investor. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, selama beberapa tahun PLTU Batang sempat terkendala proses pembangunan. WALHI menilai pembangunan PLTU bertolak belakang dengan misi presiden Jokowi yang hendak mengurangi dampak perubahan iklim.

## PEMBAHASAN

Proyek Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang 2x1000 MW telah memiliki dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa Tengah 2x1000 MW yang ditandatangani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. PLTU ini merupakan proyek yang dipersiapkan dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Acara penandatanganan kontrak KPS PLTU Jawa Tengah dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang dan Duta Besar Jepang, Dirut PT PLN (Persero), Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), CEO J-Power, CEO Itochu, CEO PT Adaro, serta undangan yang mewakili berbagai institusi terkait. Dokumen yang ditandatangani pada 6 Oktober 2011 terkait Proyek KPS PLTU Jawa Tengah, yaitu:

1. Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement) antara PT. PLN (Persero) dengan pihak pengembang listrik swasta PT Bhimasena Power Indonesia/"PT BPI"
2. Perjanjian Penjaminan (Guarantee Agreement) antara Menteri Keuangan RI dan PT PII (Persero) sebagai penjamin, dengan pihak pengembang listrik swasta PT BPI.
3. Perjanjian Regres (Recourse Agreement) antara Menteri Keuangan RI sebagai penjamin dengan PT PLN (Persero)
4. Perjanjian Regres (Recourse Agreement) antara PT PII (Persero) sebagai penjamin dengan PT PLN (Persero)
5. Sponsor Agreement untuk pengembangan proyek antara J-Power, Itochu dan Adaro.<sup>14</sup>

Seiring berjalannya mega proyek tersebut, proses komunikasi publik sangat diperlukan. Guna menjalin keserasian antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Upaya-upaya masyarakat dalam menghentikan adanya PLTU perlu dikaji dan ditimbang lebih dalam. Tak hanya di Batang, ribuan warga terus berjuang untuk melakukan konservasi hingga ke Jakarta Pusat. Aksi tersebut sebagai pengajuan gugatan ke PTUN terhadap putusan Bupati Batang No. 523/192/2012 tentang pencadangan Kawasan konservasi. Masyarakat mendesak bupati batang untuk mengutamakan

keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Meski berdalih bahwa proyek ini demi kepentingan umum, tidak bisa mengorbankan sebagian pihak hanya demi kepentingan yang lain. Meski telah di sosialisasikan secara *face to face* kepada masyarakat oleh BPI, namun penolakan-penolakan pasti akan terus terjadi. Terlebih jika meninjau dari dampak lingkungan yang akan mereka alami. Proses komunikasi langsung melalui demonstrasi oleh masyarakat tidak berujung baik karena ketiadaan tanggapan dari pihak investor (wawancara dengan masyarakat dan pihak WALHI, 23 November 2022).

Hingga kini, proyek PLTU Batang telah resmi beroperasi menjadi produsen dan pemasok listrik di wilayah Jawa-Bali. Disamping itu aksi-aksi serta tuntutan pembebasan lahan masih terus digencarkan. Pihak WALHI berharap kedepannya pemerintah lebih dapat meninjau ulang tentang penggunaan batu bara sebagai bahan baku produksi, terlebih jika menilik dampak lingkungan dan Kesehatan. Pemerintah dapat menggunakan beberapa energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan (wawancara dengan WALHI, 23 November 2022).

### **Komunikasi Publik Upaya Dialektik Menuju Masyarakat Sejahtera**

<sup>14</sup> Agviana Hardinia, "Peranan Greenpeace Dalam Penolakan Pembangunan PLTU Di Batang Tahun

2011-2013," *Global & Policy* 2, No. 2 (2014): 218–235.

Setiap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jika dipergunakan secara berlebih akan berdampak pada kestabilan alam. Bencana akan sering terjadi karena kurangnya keseimbangan alam. Sehingga, PLTU yang menggunakan bahan baku batu bara selain karena efek batu bara sendiri juga karena adanya limbah yang dihasilkan tidak berdampak positif. Meskidemikian pemerintah dan pihak investor tetap berusaha untuk mengelola limbah agar tidak berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat.

Upaya pemerintah dan investor dalam memberikan edukasi kepada masyarakat ini juga menjadi hal yang sangat diperlukan. Sebab, masyarakat perlu mewaspai adanya proyek besar ini. Kandungan-kandungan dan senyawa baru yang akan hadir disekitar mereka harus mendapatkan pencegahan. Maka masyarakatpun membuka diri untuk menerima informasi dan anjuran-anjuran dari pemerintah. Bersama-sama saling membantu untuk mewujudkan cita-cita Indonesia.

Komunikasi terhadap khalayak publik yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak investor diharapkan dapat membangun paradigma positif masyarakat. Bahwa pendirian PLTU tidak selamanya akan menjadi ancaman

bagi masyarakat sekitar. Tetapi juga bisa berdampak secara positif, selain akan adanya penambahan tenaga listrik juga banyaknya lowongan kerja yang dibuka dan masyarakat sekitar dapat memanfaatkan dengan membuka usaha-usaha dari sisi jasa hingga kuliner. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar.

Namun demikian, karena akan ada banyak perubahan yang terjadi maka pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama untuk tetap menstabilkan keadaan dan keamanan lingkungan. Sebab selain karena ancaman limbah juga karena masuknya banyak pendatang akan menimbulkan benturan budaya. Maka membutuhkan kerjasama banyak pihak.

### **Kesimpulan**

Pembangunan PLTU di wilayah Jawa Tengah akan menjamin kestabilan pasokan listrik seluruh wilayah Indonesia, terlebih dengan bantuan dari investor Jepang dan Bank Dunia turut mempermudah berjalannya proyek tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga akan berdampak bagi lingkungan sebab emisi yang digunakan oleh PLTU tidak bersifat ramah lingkungan. Realitas tersebut disadari penuh oleh pihak investor dan pemerintah. Apalagi

dampak dari penggunaan batu bara akan meningkatkan emisi karbon yang menyebabkan Indonesia cepat mengalami bencana dengan perubahan iklim yang ada. Oleh karena itu kedua pihak ialah investor (BPI) dan pemerintah selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa PLTU akan dikelola dengan baik dan benar, limbah pun akan dipastikan tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan apalagi kesehatan masyarakat. Upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di lakukan melalui media dan terjun serta bertutur secara langsung kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Benny. "Penolakan Warga Terhadap Proyek Pltu Batang: Telaah Sosiologi Hukum." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 134.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Albi Anggito & Johan Setiawan., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak., 2018).
- (Beacon Series in Contemporary Communications) Marshall McLuhan (Editor)\_ Edmund Carpenter (Editor) - Explorations in Communication, an Anthology.-Beacon Press (1960).Pdf," n.d.
- Dionty, Mona Evira, and Martha Tri Lestari. "Analisis Proses Komunikasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( Ppid ) Pt . Kereta Api Indonesia Persero Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik" 9, No. 2 (2022): 945–956.
- Hardinia, Agviana. "Peranan Greenpeace Dalam Penolakan Pembangunan PLTU Di Batang Tahun 2011-2013." *Global & Policy* 2, No. 2 (2014): 218–235.
- Laut, Konservasi, Daerah Ujungnegoro Roban Kabupaten, Djoko Suprpto, and Frida Purwanti. "Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Maquares" 3 (2014): 28–33.
- Liliweri, Alo. *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta: Kencana, 2017. [https://www.google.co.id/books/edition/Komunikasi\\_AntarPersonal/Vzq2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=alo+liliweri&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Komunikasi_AntarPersonal/Vzq2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=alo+liliweri&printsec=frontcover).
- Prabandari, Dewi, and Aloysius Rengga. "Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan PLTU Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang."



Choerul Bariyah & Mukoyimah "Analisis Komunikasi Publik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat  
(Studi Pada PLTU Kabupaten Batang)"

*Journal of Public Policy and  
Management Review* 53, no. 9  
(2018): 1689–1699.

Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian  
Kualitatif Dalam Ilmu Sosial,  
Pendidikan, Kebudayaan, Dan  
Keagamaan*. Nila Cakra Publishing  
House, Bandung, 2018.  
[yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/  
Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf](http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf).

Wahyu Sabubu, Theo Alif. "Pengaturan  
Pembangkit Listrik Tenaga Uap  
Batubara Di Indonesia  
Prespektif Hak Atas  
Lingkungan Yang Baik Dan  
Sehat." *Jurnal Lex Renaissance* 5,  
No. 1 (2020): 72–90.

